**Siwalima, 10 September 2018**

## Diusut Polisi, Dibela Kadis ESDM

PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) bukan asing lagi bagi publik. Nama perusahaan ini mulai terkenal, saat dibawa oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy ke kawasan tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru tahun 2015 lalu.

Awal masuknya PT BPS, pasca penggusuran ribuan penambang ilegal pada November 2015. Alasan pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri dan limbah sianida dipakai untuk memuluskan masuknya BPS.

MoU lalu diteken oleh Kadis ESDM dan PT BPS. Perusahaan ini diberi tugas untuk membersihkan merkuri dan sianida. Milyaran rupiah dikucur oleh  BPS ke rekening Kadis ESDM. Sebagai kompensasi, BPS diberi keleluasan untuk mengolah emas. Kendati tak memiliki izin analisa dampak lingkungan (amdal), namun gubernur dan Kadis ESDM menutup mata. BPS dibiarkan leluasa beroperasi.

BPS baru mengajukan izin amdal ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada 13 Oktober 2016. Kurang lebih satu satu tahun, setelah beroperasi. BPS baru mengantongi izin amdal pada 31 Mei 2017.

Setelah BPS beroperasi, gubernur dan Kadis ESDM juga memberikan izin kepada tiga perusahaan lainya, yaitu PT.Citra Cipta Prima (CCP), PT.Prima Indonesia Persada, dan PT.Sinergi Sahabat Setia (SSS) masuk tambang Gunung Botak. Juga tanpa mengantongi amdal.

Polres Buru saat ini sementara meng­usut PT BPS. Perusahaan ini memasok bahan kimia merek Jhin Chan untuk mengolah  emas. Sekitar 300 karung ukuran 25 kg ba­han kimia berbahaya asal Cina pe­ng­ganti asam sianida ini, di­amankan oleh Polres Buru pada Sabtu, 18 Agustus 2018 lalu, di Pelabuhan Namlae. Manajer operasi PT BPS, Bambang Riyadi sudah diperiksa. Sementara Direktur PT BPS, Fakrie mangkir.

Disaat Polres Buru tengah melakukan pengusutan, Kadis ESDM muncul dan menyatakan bahan kimia merek Jhin Chan yang dipasok oleh BPS ramah lingkungan. Tetapi ia tidak menjelaskan, secara detail soal Jhin Chan. Misalnya kadar kimianya.

Sikap yang ditunjukan Kadis ESDM seperti juru bicara PT BPS ini, bisa dimaklumi, karena perusahaan ini yang pertama dibawa masuk oleh Kadis ESDM dan gubernur ke Gunung Botak. BPS tak masuk begitu saja. Masih ingat kucuran dana milyaran rupiah ke rekening Kadis ESDM?.   Tiap bulan Kadis ESDM menerima setoran dana Rp 2,3 milyar dari BPS. Saat Kadis ESDM melantorkan pengakuan ini ke publik di Kantor Gubernur Maluku, pada Senin 11 Januari  2016 lalu, ia sudah mene­rima dua kali setoran. Pertama pada bulan November, dan berikutnya bulan Desember  2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke reke­ningnya Rp 4,6 milyar.

PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Kadis ESDM Rp 2,3 milyar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 milyar. Ia beralasan, kalau uang setiap bulan Rp 2,3 milyar yang diterimanya untuk biaya peng­amanan. Belum termasuk biaya operasional lainnya.

Kucuran dana milyaran rupiah PT BPS ke rekening Kadis ESDM, pernah diusut Kejati Maluku, saat dipimpin oleh Jan S Maringka.   Pimpinan korps adhyaksa berkoar-koar bahwa kasus ini akan diusut tuntas. Namun, setelah sejumlah pejabat dipanggil dan diperiksa, termasuk Kadis ESDM, penyelidikan kasus ini ditutup, beberapa hari sebelum Jan Maringka pindah tugas menjadi Kepala Kejati Sulawesi Selatan, dengan alasan belum cukup bukti.  Publik menyayangkan sikap Kejati Maluku yang tidak konsisten dalam penegakan hukum.

Proses hukum sementara dilakukan oleh Polres Buru atas penangkapan bahan kimia merek Jhin Chan yang dipasok PT BPS. Biarkan polisi bekerja, jangan diintervensi. Apakah BPS terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak, proses hukum yang akan menentukan, bukan hasil kajian sepihak Dinas ESDM Maluku. **(\*)**